


# adm publik

## Sofia Latifa\_202014021\_jurnal.pdf

 Universitas Abdurachman Saleh

---

### Document Details

**Submission ID**

trn:oid::8135:74007526

**Submission Date**

Dec 14, 2024, 4:29 AM GMT+7

**Download Date**

Dec 18, 2024, 11:51 AM GMT+7

**File Name**

Sofia Latifa\_202014021\_jurnal.pdf

**File Size**

450.5 KB

**10 Pages**

**3,511 Words**

**23,202 Characters**

# 17% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

## Filtered from the Report




- ▶ Bibliography
- ▶ Quoted Text
- ▶ Cited Text
- ▶ Small Matches (less than 17 words)

## Exclusions

- ▶ 495 Excluded Sources

---

## Top Sources

- 15%  Internet sources
- 10%  Publications
- 0%  Submitted works (Student Papers)

---

## Integrity Flags

### 0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

## Top Sources

- 15% Internet sources
- 10% Publications
- 0% Submitted works (Student Papers)

## Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

|    |             |   |    |
|----|-------------|---|----|
| 1  | Internet    | ejournal.unibo.ac.id  | 1% |
| 2  | Internet    | ejournal.upi.edu  | 1% |
| 3  | Internet    | journal.aaipadang.com   | 1% |
| 4  | Internet    | ojs.umsida.ac.id  | 1% |
| 5  | Internet    | ojs3.unpatti.ac.id  | 1% |
| 6  | Internet    | repositori.buddhidharma.ac.id   | 1% |
| 7  | Internet    | www.saetaestudi.net   | 1% |
| 8  | Publication | Sri Madu Rakyato, Tri Nugroho, E.W. "Implementasi Kebijakan Tata Kelola Rekla...      | 1% |
| 9  | Publication | Sri Utami. "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DIVERSIFIKASI KONSUMSI PANGAN LOKAL ...            | 1% |
| 10 | Internet    | ojs.stiami.ac.id  | 1% |
| 11 | Publication | Noviyanti Noviyanti, Hesti Inggrit Noviani, Sovianti Octaviasari, Noor Kemalia et ... | 1% |

|    |             |   |    |
|----|-------------|---|----|
| 12 | Internet    | stainupacitan.ac.id   | 1% |
| 13 | Internet    | jurnal.uindatokarama.ac.id  | 1% |
| 14 | Internet    | repository.uniks.ac.id  | 1% |
| 15 | Internet    | jurnal.umsu.ac.id   | 1% |
| 16 | Internet    | jurnal.updkediri.ac.id  | 1% |
| 17 | Internet    | repo.unr.ac.id  | 1% |
| 18 | Internet    | ummaspul.e-journal.id   | 1% |
| 19 | Publication | Andi Masruriyah, M. Nazori, Laily Ifazah. "Strategi Pemasaran pada Pedagang Ka... | 1% |
| 20 | Publication | Adinda Novita Sari, Fifiana Wisnaeni. "Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semar... | 1% |
| 21 | Internet    | journal.unnes.ac.id   | 1% |
| 22 | Internet    | jurnal.unpad.ac.id  | 1% |
| 23 | Internet    | publish.ojs-indonesia.com   | 1% |
| 24 | Internet    | ejournal.unib.ac.id   | 1% |
| 25 | Internet    | ejournal.unis.ac.id   | 1% |

26

Internet

eprints.unisnu.ac.id

1%

# IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KECAMATAN SITUBONDO KABUPATEN SITUBONDO

Sofia latifa<sup>1</sup>, Giyanto<sup>2</sup>, Farida Hanum<sup>3</sup>.

<sup>1,2,3</sup>Universitas Abdurachman Saleh, FISIP Prodi Administrasi Publik, Situbondo

Email: [latifasofia511@gmail.com](mailto:latifasofia511@gmail.com)

## ABSTRAK

Keberadaan pedagang kaki lima yang semakin banyak dan beragam kerap menimbulkan dampak negatif terutama pada masalah lingkungan. Dimana lingkungan menjadi kumuh dan juga mengganggu fasilitas umum dan pengendara, selain hal tersebut juga mengganggu ketertiban, keindahan, dan kerapian jalan Kabupaten Situbondo. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Situbondo menyusun sebuah kebijakan yang tertuang pada Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Situbondo pada Dinas Koperasi Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Situbondo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian ini yaitu pada Jalan Wr. Supratman dan Jalan Angrrek Kabupaten Situbondo serta di Dinas Koperasi Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Situbondo. Metode dalam pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan bahwa Implementasi Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Situbondo Pada Dinas Koperasi Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Situbondo ditinjau dari model teori George C. Edward III tidak terimplementasi secara maksimal. Dikarenakan 4 dimensi dari teori Edward tersebut tidak terlaksana yang terdiri dari komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.

Kata kunci: Implementasi, Peraturan Bupati, Pedagang Kaki Lima

## Abstract

The existence of more and more street vendors often has a negative impact, especially on environmental issues. Where the environment becomes slum and also disturbs public facilities and motorists; besides that, it also disturbs the order, beauty, and neatness of the Situbondo Regency roads. Based on this, the Situbondo Regency Government formulated a policy in Regent Regulation Number 13 of 2023 concerning the Arrangement and Empowerment of Street Vendors. This study aimed to determine the implementation of Regent Regulation Number 13 of 2023 concerning the Arrangement and Empowerment of Street Vendors in Situbondo District at the Office of Cooperative, Industry, and Trade in Situbondo Regency. This research uses

descriptive qualitative methods. This research is located on W.R. Supratman Street and Anggrek Street, Situbondo Regency, and at the Office of Cooperative, Industry, and Trade. The data collection methods in this study are interviews, observation, and documentation. Based on the results of the study, it can be concluded that the Implementation of Regent Regulation Number 13 of 2023 concerning the Arrangement and Empowerment of Street Vendors in Situbondo District at the Office of Cooperative, Industry, and Trade in Situbondo Regency is reviewed by the George C. Edward III theoretical model. Edward III's theoretical model needs to be maximally implemented. This is because the four dimensions of Edward's theory still need to be implemented, which consist of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure.

Keywords: Implementation, Regent Regulation, Street Vendors

## PENDAHULUAN

Pedagang kaki lima merupakan hal yang penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga harus diperhatikan agar pembangunan yang meliputi aspek tersebut dapat terlaksana secara merata dan tepat. Salah satu sektor ekonomi informal yang masih marak dijumpai di tengah-tengah kota besar maupun kota berkembang adalah pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik Pemerintah Daerah dan/atau Swasta yang bersifat sementara / tidak menetap.

Lapangan pekerjaan yang semakin lama semakin sempit mendukung banyaknya masyarakat yang bermata pencaharian menjadi pedagang kaki lima. Dibeberapa Kota/Kabupaten kerap kali menjadi dilema yang menimbulkan pro kontra, demonstrasi, dan bentrok antar warga dan aparat. Tidak berbeda dengan tempat lain termasuk wilayah Kabupaten Situbondo, yang juga tidak terlepas dengan keberadaan pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima timbul akibat adanya suatu kondisi pembangunan perekonomian dan pendidikan yang tidak merata. Pedagang kaki lima timbul dari tidak tersedianya lapangan pekerjaan, tingkat kelulusan tinggi dan lapangan pekerjaan yang tidak seimbang. Berikut jumlah pedagang kaki lima di Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo:

Tabel 1.1 Jumlah Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Situbondo

| Nomor  | Lokasi              | Jumlah Pedagang Kaki Lima |
|--------|---------------------|---------------------------|
| 1      | Jalan Wr Supratman  | 40                        |
| 2      | Jalan Anggrek       | 48                        |
| 3      | Jalan Wijaya Kusuma | 36                        |
| 4      | Jalan Sucipto       | 33                        |
| 5      | Jalan Madura        | 15                        |
| 6      | Jalan Irian Jaya    | 11                        |
| 7      | Jalan Argopuro      | 37                        |
| 8      | Jalan Ahmad Yani    | 30                        |
| Jumlah |                     | 250                       |

Sumber: Data olahan peneliti 2024

Dari data di atas, jumlah pedagang kaki lima di jalan tersebut sebanyak 250 pedagang kaki lima, pada penelitian ini peneliti mengambil lokasi penelitian di jalan WR Supratman dan jalan Anggrek dikarenakan pada lokasi tersebut pedagang kaki lima paling banyak yang menempati trotoar di Kecamatan Situbondo.

Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo sebagai usaha dalam menjalankan hak, wewenang, dan kewajiban sebagai daerah otonomi, menyusun sebuah kebijakan tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Kebijakan tersebut tertuang pada Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Peraturan tersebut dibuat atas dasar pertimbangan bahwa kegiatan pedagang kaki lima sebagai salah satu ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal yang perlu dilakukan penataan dan pemberdayaan sehingga tidak berdampak pada terganggunya kelancaran lalu lintas, estetika, dan kebersihan serta fungsi prasarana kawasan perkotaan.

Penataan pedagang kaki lima yaitu suatu langkah yang dipilih untuk menertibkan dan menata perkotaan untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan dari adanya pedagang kaki lima dengan menata maupun relokasi tanpa menghilangkan keberadaan pedagang kaki lima yang sudah menjadi sumber ekonomi bagi perkotaan (Suwandi, 2012).

Sedangkan pemberdayaan adalah sebuah proses atau tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya

Adapun tujuan dari penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima berdasarkan Peraturan Bupati tersebut ialah untuk:

- a. Memberikan kesempatan berusaha bagi PKL di lokasi yang sudah ditentukan;
- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri; dan
- c. Untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, indah, tertib, dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

Bentuk tindak lanjut pemerintah daerah inilah yaitu sebagai bentuk adanya kebijakan tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, khususnya di wilayah Kabupaten Situbondo. Walaupun tentunya pelaksanaannya masih belum efektif sesuai dengan Peraturan Bupati yang telah ditetapkan, tetapi setidaknya pedagang kaki lima mengerti dengan aturan yang ada dan pemerintah akan lebih leluasa dalam melakukan penindakan terhadap pedagang kaki lima yang tidak taat pada aturan.



Penataan dan pemberdayaan disini dalam arti bahwa perlu adanya campur tangan pemerintah untuk bisa menata dan memberdayakan pedagang kaki lima. Bentuk penataan yang dimaksud adalah bisa dengan pemberian tempat yang memadai sehingga tidak mengganggu tata letak kota, sedangkan pemberdayaan dapat dilakukan dengan memberikan modal kecil bagi mereka yang memang benar-benar membutuhkan ataupun pemenuhan sarana dan prasarana.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa pedagang kaki lima di Kecamatan Situbondo, penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kabupaten Situbondo belum pernah terlaksana, seperti wawancara awal dengan Ibu Siti selaku pedagang kaki lima yang mengatakan bahwa:

“selama saya berjualan belum pernah dilakukan penataan pedagang kaki lima, termasuk pendataan, pendaftaran, penetapan lokasi ataupun pemindahan lokasi pedagang kaki lima mbak”. (hasil wawancara dengan Ibu Siti pada tanggal 6 Mei 2024 pukul 10.57 WIB)

Sama halnya dengan wawancara dengan Ibu Darti selaku pedagang kaki lima yang menyatakan bahwa:

“iya mbak, tidak ada penataan dari Dinas ataupun Satpol-PP, sedangkan untuk pemberdayaan sendiri juga belum pernah ada mbak, termasuk peningkatan kemampuan, fasilitas sarana dagang, ataupun fasilitas peningkatan produksi”. (hasil wawancara dengan Ibu Darti pada tanggal 8 Mei 2024 pukul 11.48 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara dengan pedagang kaki lima, dapat disimpulkan bahwa penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kabupaten Situbondo khususnya di Kecamatan Situbondo belum terlaksana. Pedagang kaki lima timbul akibat adanya suatu kondisi pembangunan perekonomian dan pendidikan yang tidak merata. Pedagang kaki lima timbul dari tidak tersedianya lapangan pekerjaan, tingkat kelulusan tinggi dan lapangan pekerjaan yang tidak seimbang. Salah satu cara alternatif lain adalah dengan berdagang kecil-kecilan dengan kata lain terjun ke sektor informal.

Dari berbagai permasalahan diatas, menunjukkan bahwa pedagang kaki lima di Kabupaten Situbondo masih belum tertata rapi. Oleh karena itu, permasalahan tersebut menjadi sangat penting untuk diselesaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo agar keberadaannya tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, sangat penting adanya analisis terkait kebijakan penataan dan pemberdayaan yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah sebagai usaha dalam untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan Pemerintah Daerah saat ini dalam melakukan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima berdasarkan arah dan tujuan kebijakan yang telah disusun sebelumnya.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji suatu kebenaran pengetahuan dengan cara-cara ilmiah. Metode penelitian merupakan salah satu faktor terpenting dalam melakukan penelitian, karena pada dasarnya metode penelitian merupakan cara ilmiah dalam mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam (Moleong, 2011:4) prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan data didapatkan dari mengamati dari setiap perilaku. Dimana, tujuannya dapat memberikan gambaran-gambaran dari kejadian alamiah yang terjadi dilapangan, memberikan informasi secara sistematis berupa kata-kata bukan angka statistik, data didapatkan secara faktual atau sesuai fakta mengenai fenomena-fenomena yang terjadi dari hasil observasi atau pengamatan, dan data yang didapat dari hasil interview atau wawancara yang dilakukan oleh peneliti untuk mencari jawaban dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada informan.

## OBJEK PENELITIAN

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana tempat penelitian dilakukan. Pemilihan lokasi didasarkan pada kesesuaian dengan topik yang dipilih. Pemilihan lokasi penelitian sangat penting dalam rangka mempertanggung jawabkan data yang diambil.

Dalam penelitian ini lokasi penelitian yaitu pada Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Situbondo pada Jalan Sucipto No. 158 Situbondo dan pedagang kaki lima pada Jalan Wr Supratman dan Jalan Anggrek pada Kabupaten Situbondo. Alasan utama mengambil lokasi tersebut dikarenakan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan merupakan instansi pemerintah yang menaungi terkait pedagang kaki lima, alasan kedua dikarenakan pedagang kaki lima yang berjualan di area trotoar di Kecamatan Situbondo terbanyak berada di jalan Wr Supratman dan Jalan Anggrek Kabupaten Situbondo.

## TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Tujuan dari penelitian adalah untuk memperoleh data, maka metode penelitian pengumpulan data merupakan langkah yang paling vital dalam suatu penelitian. Menurut Sugiyono (2018:224) pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari settingnya, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah, pada laboratorium dengan metode eksperimen, di rumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar, diskusi, di jalan dan lain-lain. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

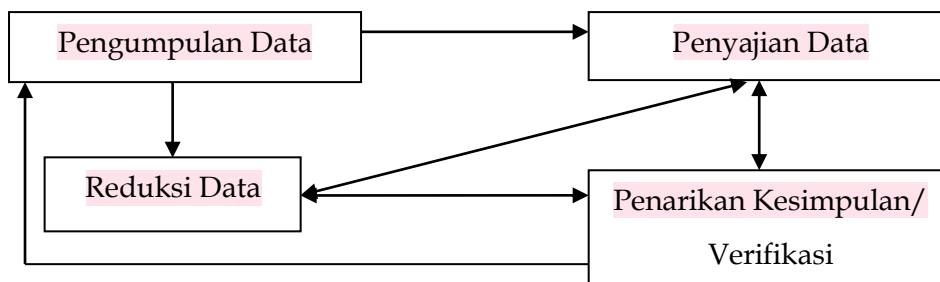
- a. Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati secara langsung di lapangan mengenai objek yang akan diteliti, observasi yang dilakukan dengan cara mengamati proses kerja, perilaku, dan fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan.
- b. Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi melalui proses tanya jawab. Menurut Yusuf (2014:372) wawancara adalah suatu kejadian atau proses interaksi antara pewawancara dan sumber

informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi secara langsung atau bertanya secara langsung mengenai suatu objek yang diteliti.

- c. Dokumentasi merupakan pelengkap dalam pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian akan lebih percaya bila ada dokumen pendukung dari proses penelitian. Metode ini digunakan untuk memperoleh data penting tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian yang bersifat dokumenter seperti letak geografis, gambar-gambar keadaan pedagang kaki lima, dan sebagainya.

## METODE ANALISIS DATA

Menurut Sugiyono (2017:130) teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasi data ke dalam kategori, dijabarkan dalam unit-unit, dikelompokkan, disusun dalam pola, dipilih yang penting, dan disimpulkan. Komponen dalam analisis data yaitu:



Gambar 1 Komponen Analisis Data Model Interaktif Miles Dan Huberman (1984)

Komponen tersebut menurut Miles dan Huberman (1984) dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pengumpulan Data (*Data Collection*)  
Pengumpulan data dapat diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi atau gabungan dari ketiganya (triangulasi).
- b. Reduksi Data (*Data Reduction*)  
Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Banyaknya data yang diperoleh dari lapangan mulai dari awal penelitian, saat penelitian dicatat secara teliti dan rinci. Semakin banyak data yang diperoleh maka akan semakin kompleks.
- c. Penyajian Data (*Data Display*)  
Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya (Sugiyono,2008:249). Penyajian data dalam bentuk demikian dimaksudkan untuk memudahkan peneliti melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dalam penelitian.
- d. Kesimpulan atau Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Verifikasi merupakan proses akhir dalam analisis data, verifikasi merupakan pengujian kebenaran, kecocokan, dan kekukuhan dari makna-makna sehingga data tersebut tervaliditas kebenarannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi merupakan pelaksanaan atau suatu kegiatan yang diambil dari proses pengambilan keputusan untuk melaksanakan sesuatu yang didukung oleh sarana yang memadai sehingga akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu setelahnya. Peneliti akan menjelaskan bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo.

George C. Edward III menjelaskan bahwa keberhasilan pada implementasi suatu kebijakan dapat dilihat dari proses-proses pencapaian yang telah ditentukan sebelumnya apakah telah tercapai atau belum tercapai. Berdasarkan data yang penulis peroleh bahwasannya masih banyak pedagang kaki lima yang berjualan di sepanjang Jalan Wr Supratman dan Jalan Angrrek di Kabupaten Situbondo.

Implementasi Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Situbondo. Awal muncul kebijakan terkait penataan pedagang kaki lima adalah dikarenakan pemerintah melihat adanya suatu kebijakan yang menyangkut kepentingan umum. Larangan pedagang berjualan di trotoar atau area publik diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Situbondo.

Untuk mengukur implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kabupaten Situbondo, peneliti menggunakan 4 dimensi yang terdiri dari komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Adapun pembahasan dari ke lima dimensi tersebut kaitannya dengan implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kabupaten Situbondo adalah sebagai berikut:

### 1. Komunikasi

Komunikasi diartikan sebagai proses penyampain informasi komunikator kepada komunikan. Komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampain informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy maker*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementers*). Komunikasi yang dimaksud menurut Edward yaitu para pelaksana mengetahui apa yang mereka kerjakan, adanya petunjuk-petunjuk yang jelas dalam pelaksanaannya dan adanya konsistensi dalam perintah sehingga pelaksana kebijakan dapat melaksanakan tugas dengan baik.

Informasi kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui, memahami apa yang menjadi isu, tujuan, arah, kelompok sasaran (*target groups*) kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mempersiapkan dengan benar apa yang harus dipersiapkan dan lakukan untuk melaksanakan kebijakan publik agar apa yang menjadi tujuan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

Komunikasi yang dilakukan Dinas Koperasi Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Situbondo dalam menata dan memberdayakan pedagang kaki lima di Jalan WR. Supratman dan Jalan Anggrek Kabupaten Situbondo tidak

berjalan dengan baik dikarenakan pelaksana kebijakan belum menyampaikan informasi kepada para sasaran kebijakan yaitu pedagang kaki lima.

## 2. Sumberdaya

Sumberdaya menekankan suatu kebijakan memerlukan dukungan dengan sumber daya yang memadai baik sumber daya manusia maupun sumberdaya finansial. Sumberdaya manusia merupakan kecukupan yang baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumberdaya finansial adalah kecukupan modal dari sebuah investasi atas sebuah program suatu kebijakan.

Kedua sumberdaya tersebut harus diperhatikan dalam sebuah implementasi kebijakan sebab tanpa adanya implementor kebijakan akan menjadi kurang energy dan berjalan dengan lambat. Sumberdaya mempunyai peranan penting dalam keberhasilan dan kegagalan implementasi suatu kebijakan. Kejelasan aturan dan penyampaian seakurat apapun mengenai ketentuan-ketentuan tidak menjamin berhasilnya suatu kebijakan jika sumberdaya tidak tersedia dengan baik.

Sumber daya manusia atau staf di Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan belum memadai dikarenakan belum ada staf dari dinas tersebut yang terjun langsung ke pedagang kaki lima untuk menginformasikan tentang hal penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Dan juga masih belum adanya dana operasional ataupun fasilitas untuk para pedagang kaki lima.

## 3. Disposisi

Disposisi merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan yang terdiri atas pengetahuan, pendalaman atau pemahaman serta respon menolak, netral ataupun menerima terhadap kebijakan. Akan tetapi, implementor yang memiliki komitmen tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan diantara hambatan yang ditemui dalam kebijakan. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam arah program yang ditetapkan. Komitmen dan kejujuran akan membawanya semakin antusias dalam melaksanakan tahap-tahap program secara konsisten.

Salah satu hal penting yang harus ada ketika melihat sejauh mana implementasi suatu program dilaksanakan yaitu sikap dari pelaksana itu sendiri. Pelaksana akan berpengaruh terhadap keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan. Sikap pelaksana dalam mengimplementasikan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 belum cukup baik, dinas terkait belum memberikan informasi terkait penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.

## 4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi juga mempengaruhi efisiensi dalam melaksanakan tugas, karena struktur birokrasi mencakup pembagian kewenangan, hubungan antar unit organisasi, dan hubungan organisasi dengan organisasi luar. Keberhasilan dari implementasi kebijakan perlu adanya kerjasama antara banyak orang.

Struktur birokrasi berkenaan dengan prosedur atau pola yang dapat mengatur jalannya pekerjaan dalam implementasi suatu kebijakan. Adapun struktur birokrasi yang dimaksud adalah adanya prosedur yang mengatur tata atur pekerjaan dan pelaksana suatu program. Struktur birokrasi memberikan arti bahwa dalam suatu organisasi pemerintah atau birokrasi memiliki struktur atau SOP yang terkait dengan tugas dan tanggung jawab yang telah di bebaskan.

Sesuai dengan yang terjadi di lapangan, penanganan pedagang kaki lima belum sesuai dengan SOP. Dimana pedagang kaki lima belum pernah di tata ataupun belum adanya pemberdayaan. Dinas terkait belum berkoordinasi terkait penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima bersama Satpol-PP.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terkait Implementasi Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Situbondo di Kabupaten Situbondo di dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan yang ada.

### 1. Komunikasi

Komunikasi yang dilakukan belum jelas karena pelaksana kebijakan belum menyampaikan kepada para sasaran kebijakan yaitu para pedagang kaki lima (PKL) terkait Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

### 2. Sumberdaya

Sumber daya manusia atau staf di Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan belum memadai dikarenakan belum ada staf dari dinas tersebut yang terjun langsung ke pedagang kaki lima untuk menginformasikan tentang hal penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Dan juga masih belum adanya dana operasional ataupun fasilitas untuk para pedagang kaki lima.

### 3. Disposisi

Penataan pedagang kaki lima (PKL) tersebut para pelaksana kebijakan dalam mengimplementasikan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 belum baik, dinas terkait belum memberikan informasi terkait penataan dan pemberdayaan.

### 4. Struktur Birokrasi

Berdasarkan hasil wawancara, maka struktur birokrasi dalam penanganan pedagang kaki lima belum sesuai dengan SOP. Dimana pedagang kaki lima belum pernah di tata ataupun belum adanya pemberdayaan. Dinas terkait belum berkoordinasi terkait penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima bersama Satpol-PP.

## SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, Dinas Koperasi Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Situbondo seharusnya melakukan sosialisasi dengan sasaran kebijakan yaitu pedagang kaki lima serta memiliki komitmen atau tanggungjawab dalam mengimplementasikan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima agar peraturan tersebut terimplementasi dengan baik.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih memuat apresiasi yang diberikan oleh saya kepada pihak-pihak yang telah berperan dalam penelitian, baik dalam bentuk support dana, perizinan, konsultan, maupun membantu dalam pengambilan data. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada:



1. Bapak Dr. Muhammad Yusuf Ibrahim, S.H., M.H Rektor Universitas Abdurachman Saleh Situbondo yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari sivitas Akademik UNARS.
2. Bapak Dr. Giyanto S.AP, M.Si selaku Dosen Pembimbing Utama yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dan bimbingannya.
3. Ibu Dra. Farida Hanum M.Si selaku Dosen Pembimbing Anggota yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dalam mengerjakan.
4. Bapak/Ibu staf di Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Situbondo yang telah mengizinkan saya melakukan penelitian dan memberikan bimbingan dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.

### REFERENSI

- Abdul Wahab, Solichin. 2015. *Analisis Kebijakan (Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik)*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Badudu, J. S, Sutan Mohammad Zain, 2001, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta :Pustaka Sinar Harapan.
- Kadji, Yulianto. 2015. *Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik:Kepemimpinan Dan Perilaku Birokrasi Dalam Fakta Realitas*. Gorontalo: Ung Press Gorontalo
- Moleong, Ij. 2011.*Metodologi penelitian kualitatif* edisi revisi. Bandung: pt remaja rosdakarya.
- Nugroho, R. 2004. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi*. Jakarta: Pt. Alex Media Komputindo.
- Pasolong, H. 2013. *Teori Administrasi Public*. Bandung: Alfabeta
- Rukminto, Isbandi. 2001. *Pentingnya Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama.
- Sagir, H.S. 1989. *Membangun Manusia Karya – Masalah Ketenagakerjaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta, Pustaka Sinar harapan.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung:alfabeta.
- Wahab, A. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Pers.
- Widjaja, Haw. 2003. *Titik Berat Otonomi Pada Daerah Tingkat Ii*. Pt. Raja Grafindo Persada. Jakarta

### Undang-Undang

- Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
- Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima